Program *Urban Farming* Sebagai Model Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Perkotaan (Studi Kasus di Kelompok Tani Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya)

Wahida Junainah^{1*}, Sanggar Kanto², Soenyono³

¹Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya ²Dosen Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya ³Dosen Pascasarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya

Abstrak

Program *Urban Farming* adalah salah satu program dari Dinas Pertanian yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dalam memenuhi konsumsi makanan yang bergizi dan untuk mengurangi pengeluaran keluarga. Dalam pelaksanaannya ada petugas pendamping teknis yang biasa disebut tenaga PPL. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang mengambil lokus di Kelompok Tani Tegal Makmur Kelurahan Keputih. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik sosial yang terjadi pada implementasi program ini dan bagaimana partisipasi kelompok tani dalam proses perencanan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Oleh karena itu peneliti menggunakan Teori Strukturasi Anthony Giddens, konsep partisipasi dan konsep pengembangan masyarakat dalam mengupas dan menganalisanya. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa masih adanya kekurangan dari struktur dalam implementasi program ini yaitu terdapat kendala minimnya air untuk kegiatan *urban farming* terutama disaat musim kemarau dan teknik pertanian yang diterapkan belum sesuai dengan kondisi wilayah RW VIII Kelurahan Keputih. Dilihat dari konsep partisipasi agent juga belum dilibatkan saat proses perencanaan program atau bisa dikatakan bahwa program ini bersifat Top Down. Namun meskipun program ini belum berdampak nyata terhadap pengentasan kemiskinan pada Kelompok Tani Tegal Makmur RW VIII Kelurahan Keputih, program ini bisa dikatakan berhasil sekitar 60%. Hal ini antara lain disebabkan oleh antusias Kelompok Tani (agent) dalam menjalankan program ini dan didorong oleh PPL yang juga sangat antusias membantu kelompok tani.

Kata Kunci: Program Urban Farming, Kelompok Tani Miskin, Teori Strukturasi

Abstract

The urban farming program is one program of the Department of Agriculture to help the poor in meeting the consumption of nutritious foods and to reduce family expenses. In practice there are technical escort officers commonly called PPL officer. This is a qualitative research with case study approach that takes the locus in Tegal Makmur Farmer Groups at Keputih Village. The purpose of this research was to determine how social practices that occur in the implementation of this program and how the participation of farmers' groups in the planning, implementation, monitoring and evaluation process. Therefore, researchers use Anthony Giddens Structuration theory, participation concept and also community development concept in peeling and analyze it. The results of this research show that there is still a shortage of structures in the implementation of this program which is the lack of water that become obstacles to urban farming activities, especially when drought and also farming techniques applied are not suitable with the conditions of RW VIII Keputih Village. Judging from the participation concept, agent are not involved in the planning program or can be said that this is a top down program. However, although the program not yet have a real impact on poverty reduction in Tegal Makmur Farmers Group of RW VIII Keputih Village, this program is successful about 60%. This is partly due to the enthusiastic from farmer groups (agent) in carrying out this program and also encouraged by the PPL that very enthusiastic to help the farmer groups.

Keywords: urban farming program, poor farmers group, structuration theory

PENDAHULUAN

Dinas Pertanian melalui Seksi Tanaman Pangan dan Holtikultura berusaha menepis anggapan masyarakat kota yang selama ini menganggap tidak mungkin pertanian dilaksanakan di lahan perkotaan yang sempit dan kotor menjadi lahan yang menghasilkan atau produktif, bersih dan hijau. Melalui kegiatan bimbingan teknis dan penyuluhan yang telah dilakukan oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Dinas Pertanian berusaha mendorong, memotivasi masyarakat miskin perkotaan untuk melakukan gerakan lingkungan

ISSN

: 1411-0199

: 2338-1884

Alamat Korespondensi Penulis:

Wahida Junainah

Email : wahidajunainah@gmail.com Alamat : Manyar Sabrangan 93 Surabaya hijau melalui Program *Urban Farming* yang bertujuan disamping untuk mencukupi kebutuhan pangan sehari-hari juga untuk menciptakan lapangan kerja baru sektor non formal.

Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia. Sebagai kota besar tak mungkin mengelak dari persoalan pertanahan dan problem disorganisasi sosial. Banyak masyarakat sekitar Kota Surabaya yang berusaha mencari peruntungan di kota ini. Perkembangan penduduk terutama akibat arus urbanisasi yang pesat (over urbanization) dan arah perkembangan kota yang cenderung hanya mengejar kemajuan ekonomi adalah awal mula munculnya berbagai persoalan di kota besar seperti Surabaya [1]. Arus Urbanisasi terus saja mengalir hingga saat ini yang mana hal ini menimbulkan banyak masalah yang timbul sebagai dampak urbanisasi seperti pengangguran, kemiskinan, kurang gizi, kriminalitas, pertumbuhan penduduk yang tinggi, kepadatan penduduk, timbulnya bangunan-bangunan liar, kurangnya lapangan pekerjaan dan meningkatnya jumlah kebutuhan bahan makanan pokok.

Program *Urban Farming* pada Kelompok Tani Kelurahan Keputih ini merupakan salah satu kasus praktik sosial yang didalamnya terdapat relasi yang saling terkait antara agent dan struktur (agency and structure) yang terjadi sepanjang ruang dan waktu yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan masyarakat miskin dan pemenuhan kebutuhan lapangan pekerjaan di sektor non formal. Teori strukturasi dari Anthony Giddens dapat digunakan untuk menjelaskan praktik-praktik sosial yang ada di Program Urban Farming ini yang mana dalam teori tersebut dijelaskan relasi antara agen dan struktur. Dimana penerima program sebagai agent sedangkan program itu sendiri berperan sebagai struktur. Adapun kegiatan di dalam pelaksanaan program tersebut disebut sebagai agency.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Peneliti memilih Kelompok Tani Tegal Makmur Kelurahan Keputih sebagai lokus penelitian karena Kelompok ini menjadi pemenang lomba *urban farming* tahun 2014 yang diadakan oleh Dinas Pertanian dan sebagian besar anggotanya adalah masyarakat miskin.

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik wawancara, dokumen dan teknik observasi kepada para informan yang telah dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling* (sampel bertujuan) yakni penetapan *informan* untuk dijadikan sampel berdasarkan pada

kriteria-kriteria tertentu [2]. Adapun Informan dalam penelitian ini antara lain Ketua Kelompok Tani, PPL Dinas Pertanian, Kepala Seksi Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian, Kasie Kesra Kelurahan dan salah satu anggota Kelompok Tani.

Kualitas data dan ketepatan metode yang digunakan sangat penting dalam penelitian sosial. Untuk itu peneliti menggunakan derajat kepercayaan (*credibility*) dan uji kebergantungan (*dependability*) dalam menguji hasil penelitian ini.

Adapun untuk analisa data menggunakan teknik menurut [3] dimana dalam menganalisa data terdiri dari 4 komponen yaitu Pengumpulan data, kondensasi data, display data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN Deskripsi Wilayah Penelitian

Kelurahan Keputih terletak di ujung Timur Kota Surabaya yang mana batas Timur adalah laut, Utara berbatasan dengan Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Selatan dengan Kelurahan Semampir dan Barat dengan Kelurahan Klampis Ngasem. Melihat letaknya yang merupakan lokus yang paling ujung dari Surabaya Timur, di Kelurahan Keputih terdapat lahan yang cukup luas yang belum dimanfaatkan seperti lahan tidur dan rawa-rawa yang merupakan perbatasan area laut dan darat. Sebagai wilayah perkotaan, rumah tangga yang berusaha di bidang pertanian makin lama makin sedikit. Seperti yang ditunjukkan oleh hasil Sensus Pertanian yang dilakukan BPS tahun 2003 jumlah rumah tangga tani di Kecamatan Sukolilo menunjukkan angka 735 rumah tangga. Angka ini menurun sangat tajam sebesar 60,68% jika dibandingkan hasil sensus Pertanian tahun 2013 yang menunjukkan angka 289 rumah tangga. Angka diatas juga berbanding lurus dengan angka hasil sensus pertanian kota Surabaya, yang menunjukkan bahwa rumah tangga usaha pertanian untuk tanaman holtikultura yaitu 3.599 rumah tangga pada tahun 2003 menjadi 1.900 rumah tangga pada tahun 2013 (menurun 47,21%). Melihat data seperti ini maka Dinas Pertanian merasa perlu mengeluarkan Program Urban Farming bagi penduduk miskin di kota Surabaya pada tahun 2009 yang mana saat itu juga ditunjang dengan adanya dampak krisis moneter yang sangat memberatkan masyarakat miskin.

Gambaran Umum Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin Kecamatan Sukolilo menurut PPLS 2011 menempati urutan no.11 dari 31 kecamatan se Kota Surabaya. Sedangkan jumlah penduduk miskin di Kelurahan Keputih menempati urutan ke 6 dari 7 kelurahan di Kecamatan Sukolilo.

Melihat angka ini sebenarnya Kelurahan Keputih mayoritas dihuni oleh rumah tangga mampu, hal ini karena di Kelurahan Keputih terdapat banyak perumahan yang penduduknya telah memiliki pekerjaan tetap di sektor formal maupun informal. Namun untuk wilayah RW VIII berbeda dengan kondisi mayoritas penduduk Keputih, yang mana wilayah ini dihuni oleh mayoritas warga miskin .

Jika dibandingkan dengan tahun 2012, jumlah penduduk miskin se Kecamatan Sukolilo mengalami peningkatan 69% dari 2.611 keluarga pada tahun 2012 menjadi 4.416 keluarga pada tahun 2013. Sedangkan untuk Kelurahan Keputih prosentase Keluarga miskin mencapai 11,54% (400 keluarga).

Kelompok Tani Tegal Makmur adalah sebagian dari penduduk miskin yang tergabung dalam Kelompok Tani yang dibentuk oleh Kelurahan. Mereka menempati wilayah Kelurahan Keputih tepatnya di Keputih Tegal Timur Baru RT 03 dan RT 04 RW VIII Kelurahan Keputih.

Dari hasil pengamatan di lapangan kemiskinan yang ada di Kelurahan Keputih dikarenakan mereka yang melakukan urbanisasi ke kota Surabaya tidak dibekali dengan pendidikan yang memadai sehingga mereka sulit mendapatkan pekerjaan di sektor formal yang layak untuk kelangsungan hidup. Sedangkan di sektor non disamping formal mereka tidak memiliki ketrampilan juga sulit mendapatkan akses dalam mendapatkan modal usaha dan sumber-sumber informasi yang dapat memperbaiki kehidupan mereka.

Gambaran tentang Program Urban Farming

Urban farming merupakan salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya sejak tahun 2009 hingga sekarang melalui Dinas Pertanian yang bertujuan membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan pangan yang sehat membantu bergizi serta mengurangi pengeluaran keluarga. Program ini memang dikhususkan untuk masyarakat miskin yang tinggal di Kota Surabaya khususnya yang tergabung dalam kelompok tani. Melalui program urban farming ini kelompok tani mendapat bantuan berupa benih (sawi, bayam,kangkung), bibit (lombok, terong, tomat), pupuk organik cair dan media tanam berupa (tanah, polybag dan kompos).

Dalam pelaksanaannya di lapangan kelompok tani mendapat bimbingan teknis, motivasi dan pendampingan dari PPL (Petugas Penyuluh Lapangan) yang ditugaskan oleh Dinas Pertanian.

Implementasi Program *Urban Farming* pada Kelompok Tani Kelurahan Keputih Ditinjau dari Teori Strukturasi Anthony Giddens

Program urban farming ini muncul oleh karena Dinas Pertanian melihat adanya kondisi masyarakat miskin yang serba kekurangan dan tidak terpenuhinya hak-hak dasar sebagai manusia seperti tidak terpenuhinya gizi keluarga. Hal ini kalau ditinjau dari teori strukturasi Anthony Giddens, Program menunjukkan pada posisi struktur sedangkan Kelompok Tani menunjuk pada posisi agent. Dengan adanya Program Urban Farming mendorong masyarakat miskin yang tergabung dalam Kelompok Tani Tegal Makmur (agent) untuk melakukan tindakan sosial.

Program *Urban Farming* pada Kelompok Tani Kelurahan Keputih ini sudah berjalan sesuai petunjuk dari PPL Dinperta, yang mana praktik sosial telah terjadi didalamnya. Giddens dalam teori strukturasinya melihat bahwa hubungan antara aktor dengan struktur adalah relasi dualitas bukan dualisme. Dualitas terjadi pada praktik sosial yang berulang dan terpola dalam lintas ruang dan waktu. Dalam pemaknaan seperti ini praktik sosial menunjukkan posisi agent sedangkan keterulangan dan keterpolaan dari praktik sosial merujuk pada posisi struktur. Oleh karena itu masyarakat bagi Giddens adalah agregasi dari berbagai bentuk ragam praktik sosial yang terus terulang dalam bingkai ruang dan waktu [4].

Berdasar pengamatan di lapangan yang di lakukan peneliti, program ini belum mampu mengentaskan masyarakat miskin yang tergabung dalam Kelompok Tani Tegal Makmur Kelurahan Keputih keluar dari jeratan kemiskinan dikarenakan Produk yang dihasilkan masih produk lokal (sawi, kangkung, bayam, terong, tomat) sementara peluang di Kota Surabaya untuk sayuran produk luar negeri (kale, red oak, basil, aneka macam slada, kol merah, romain) sangat tinggi, belum mampu membuka lapangan kerja baru di wilayah tersebut, Pemasaran produk sayuran belum meluas, Teknologi pertanian belum menyesuaikan dengan kondisi wilayah Kelompok tani dimana pada musim kemarau sangat sulit dalam penyediaan air khususnya di lahan komunal, pengelolaan program urban farming masih belum modern, Penanaman dengan menggunakan polibag belum mampu menghasilkan produk yang berlimpah (masih sebatas memenuhi konsumsi sendiri).

Namun dari kekurangan tersebut diatas, terdapat kelebihan-kelebihan dalam prakteknya yaitu antara lain antusiasme Kelompok Tani (agent) sebagai penerima program dan Dinas Pertanian sebagai pemilik program serta PPL (struktur) sebagai tenaga pendamping program.

Pandangan Tentang Struktur

Dalam Teori Strukturasi yang menjadi pijakan adalah struktur. Karena struktur yang terbentuk di masyarakat inilah yang memungkinkan terjadinya tindakan-tindakan sosial. Menurut pandangan Giddens, struktur itu sebagai "rules and resources" yakni tata aturan dan sumber daya, yang selalu diproduksi dan direproduksi, serta memiliki hubungan dualitas dengan agensi, serta melahirkan berbagai praktik sosial sebagaimana tindakan sosial.

Dengan adanya kondisi kemiskinan masyarakat maka mendorong pemerintah untuk mengeluarkan program-program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan melalui berbagai SKPD di Lingkungan Kota Surabaya. Dalam hal ini diatur oleh SK Walikota Surabaya Nomor 188.45/300/436.1.2/2011 tentang Program Penanggulangan Kemiskinan yang dalam pelaksanaannnya dibentuklah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Surabaya. Program urban farming termasuk salah satu dari program Penanggulangan Kemiskinan tersebut.

Melihat antusiasnya Kelompok Tani ini dan juga PPL yang selalu mendampingi kegiatan, membuat program ini mudah diterima dan berjalan dengan lancar tanpa ada penolakan. Menurut Giddens struktur sebagai Rule and Resources, dalam hal ini tata aturan yang terbentuk disini adalah dengan adanya program urban farming itu otomatis memunculkan aturan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program. Sebagaimana program pengembangan masyarakat proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi adalah hal yang seharusnya dilakukan karena mulai dari proses-proses tersebut memungkinkan adanya tindakan timbal balik antara agen dan struktur. Relasi antara struktur dan agen ini sebagaimana penuturan Ibu Ummu Ketua Kelompok Tani sebagai berikut:

"Melalui Program *Urban Farming* ini kita dengan warga disini jadi tambah guyup, kita sering melakukan kegiatan bersama-sama seperti saat penanaman, perawatan dan pemanenan di lahan (lahan komunal), pelatihan, sosialisasi, pertemuan rutin bulanan, dan gelar produk pertanian".

Sumber daya (resources) yang diproduksi dalam hal ini antara lain bisa sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Secara tidak sadar proses pembangunan memerlukan peran SDM baik itu masyarakat miskin itu sendiri maupun pekerjapekerja sosial (PPL) yang secara profesional menyalurkan ilmu dan ketrampilannya kepada agen untuk melakukan apa-apa yang menjadi tujuannya. Sumber daya (resources) tersebut dalam mayarakat

selalu diproduksi dan direproduksi karena proses pengembangan masyarakat akan terus berlangsung sampai akhir hayat manusia. Hubungan antara struktur dengan agensi menurut Giddens adalah hubungan yang dualitas dimana keduanya saling memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi, agen mempunyai keterbatasan dalam melakukan tidakan sosial tapi disisi lain agen juga memiliki kekuasaan untuk berkembang.

Agen dan Agensi

Menurut Teori Strukturasi bahwa bentuk refleksif jangkauan pengetahuan agen-agen manusialah yang paling banyak terlibat dalam penataan rekursif praktek-praktek sosial. Pengetahuan Kelompok Tani sangat mempengaruhi kesadaran mereka. Semakin pengetahuan yang ia miliki semakin mudah untuk diajak berkembang. Tindakan yang berulang-ulang dari agenlah (individu) yang melahirkan struktur. Istilah ini yang disebut oleh ilmuwan sosial adalah struktur sosial atau kekuatan sosial [5].

Agen pada Program *Urban Farming* ini adalah Kelompok Tani yang siap melakukan perubahan (agent of change) dimana atas tindakan sosial mereka menyebabkan terjadinya perubahan yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka untuk menjadi lebih baik. Sedangkan agensi adalah kegiatan atau peristiwa yang menyebabkan perubahan dalam hal ini kegiatan dalam Program *Urban Farming* itu sendiri seperti kegiatan budidaya tanaman pangan dan holtikultura yang meliputi penanaman, perawatan dan pemanenan di lahan komunal, kegiatan pertemuan rutin, pelatihan maupun sosialisasi.

Agen dan struktur merupakan dua elemen masyarakat yang mempunyai sifat timbal balik yang tidak bisa terpisahkan dan hal tersebut bisa menjelaskan praktik sosial. Agen disini sebagai kelompok yang mengharapkan adanya perubahan dalam hidup mereka, yang semula miskin menjadi lebih sejahtera, sedangkan struktur mempunyai kekuasaan untuk merubah kehidupan agen menjadi lebih berdaya. Kelompok Tani ini yang berfungsi selaku agen mendapat motivasi dan ilmu pengetahuan serta ketrampilan dari PPL yang merupakan bagian dari struktur. PPL dengan sabar mendampingi Kelompok Tani untuk melakukan perubahan sosial, hal ini seperti penuturan dari ibu Surati (anggota Kelompok Tani):

"Ibu PPL lah mbak yang mengajari cara budidaya tanaman sawi, terong, tomat, lombok dan yang lainnya, Ibu Nani sering datang kesini melihat perkembangan tanaman, kalo ada masalah misalnya terserang penyakit, pertumbuhan yang kurang subur, ibu Nani memberikan solusinya."

Meskipun struktur itu sendiri bersifat mengekang namun struktur juga memberikan peluang bagi agen. Seperti apa yang telah dikatakan oleh Giddens, Agen dan struktur memiliki pola prinsip structural yaitu signifikasi (signification) yang menyangkut skemata simbolik, pemaknaan, penyebutan, dan wacana. Dominasi (domination) yang mencakup skemata penguasaan atas orang (politik) dan barang atau hal (ekonomi). Legitimasi (legitimation) yang menyangkut skemata peraturan normatif, yang terungkap dalam tata hukum [4].

- 1. Struktur signifikasi, disini seperti adanya penyebutan kader lingkungan bagi kelompok tani. Penyebutan tersebut terus terulang dalam kehidupan sosial. Sedangkan wacana lebih kepada sosialisasi kepada warga sekitar mengenai pemanfaatan pekarangan maupun lahan kosong melalui program urban farming dengan menanam tanaman holtikultura bantuan dari Dinas Pertanian, yang mana materi yang disampaikan kepada warga sekitar akan memberikan sebuah wacana baru bagi warga sekitar terhadap pemanfaatan lingkungan melalui program urban farming.
- 2. Struktur dominasi, disini seperti dominasi yang dilakukan oleh PPL kepada kelompok tani dengan mengajak para anggota kelompok tani untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar, dalam hal ini dengan melakukan penanaman tanaman holtikultura yang dapat memenuhi konsumsi keluarga dan pengurangan pengeluaran keluarga. Dominasi disini lebih dikhususkan kepada bagaimana peran PPL untuk membuat kelompok tani mengikuti anjuran PPL.
- 3. Struktur legitimasi, disini seperti ketika praktik sosial yang terjadi di Kelompok tani yang merupakan institusi yang bersifat kelembagaan seorang anggota akan melakukan pekerjaannya setelah mendapatkan ijin serta arahan dari ketua kelompoknya atau setelah menerima arahan dari PPL. Arahan dari PPL untuk selalu melakukan kegiatan pencatatan atau administrasi kegiatan kadang belum dijalankan oleh kelompok tani sehingga legitimasi yang berlaku disini berupa teguran.

Adapun perubahan dari agen menurut Giddens tercermin dari kesadaran kelompok tani yang terbagi menjadadi tiga tahapan, yaitu :

1. Motif atau kognisi tak sadar (unconscious motives/cognition)

Dalam praktek pemanfaatan pekarangan dalam program urban farming terkadang aktor melakukan sesuatu karena motif tertentu, seperti melakukan kegiatan penanaman kalau mau ada lomba saja, setelah lewat beberapa hari tanaman tersebut tidak diperhatikan dengan alasan lupa atau

malas. Hal ini terjadi pada saat dilakukan wawancara dan ditanyakan tentang bibit tanamannya ternyata belum ditanam.

2. Kesadaran Diskursif (discursive consciousness).

Kesadaran diskursif antara PPL dan kelompok tani sudah terjalin, hal ini nampak dari kelompok tani yang mulai mampu untuk mempraktekkan pengetahuan dan ketrampilan yang didapat dari PPL. Seperti cara budidaya tanaman pangan dan holtikultura, cara pemanenan, waktu panen dan cara pengadministrasi kegiatan untuk laporan ke Dinas Pertanian karena sebelumnya kelompok tani administrasi belum bisa membuat pengorganisasian kelompok dengan baik. Kesadaran ini sudah terbentuk dengan baik, dan bahkan telah berkembang menjadi kebiasaan untuk kelangsungan kegiatan kelompok tani.

3. Kesadaran Praktis (practical consciousness).

Kesadaran praktis merupakan kunci untuk memahami strukturasi. Kegiatan urban farming di Kelompok Tani Tegal Makmur ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapat dukungan dari penerima program karena kelompok tani yang merupakan penerima program ini sudah sadar akan pentingnya pemanfaatan pekarangan dan lahan kosong untuk menunjang kebutuhan hidup yaitu untuk memenuhi gizi keluarga dan mengurangi pengeluaran keluarga. Kelompok tani juga sudah memahami dan menyadari pentingnya pemenuhan gizi keluarga dan lingkungan yang asri dan hijau di sekitar rumah mereka.

Dualitas dalam Strukturasi

Dalam teori strukturasi agen dan struktur tidak dapat dipisahkan sebagai dualitas karena keduanya saling berhubungan timbal balik dan mempengaruhi. Kegiatan dalam Program *Urban Farming* tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan kelompok tani (agen), begitu pula sebaliknya Kelompok Tani Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya yang mayoritas anggotanya adalah masyarakat *urban* yang miskin, tidak akan ada kegiatan atau kegiatannya kurang maksimal tanpa dukungan berupa Program *Urban Farming* yang dikucurkan oleh Dinas Pertanian.

Relasi Agen – Struktur

Relasi antara Agen dan Struktur dalam teori strukturasi Anthony Giddens adalah relasi dualitas bukan dualisme artinya sebuah hubungan yang timbal balik dan saling mempengaruhi yang mana dualitas terjadi pada praktik sosial yang berulang dan terpola dalam lintas ruang dan waktu. Praktik sosial yang terjadi dalam program *Urban Farming* ini adalah masyarakat miskin tergabung dalam kelompok tani sangat membutuhkan bantuan/support dari pemerintah ditindaklanjuti oleh petugas PPL yang merupakan kepanjangantangan

/wakil dari Dinas Pertanian (struktur) untuk memberikan dorongan, motivasi, penyuluhan tentang pemanfaatan pekarangan dan lahan tidur dengan cara bertanam tanaman holtikultura untuk membantu penyediaan bahan makanan dan pengurangan pengeluaran keluarga mereka. Praktik sosial disini sebagai aktor sedangkan keterulangan dan keterpolaan dari praktik sosial membentuk struktur.

Partisipasi Masyarakat dalam Konsep Pengembangan Masyarakat Melalui Kegiatan dalam Program *Urban Farming*.

Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat perlu pendayagunaan sumber-sumber yang ada pada mereka dengan menerapkan prinsip partisipasi sosial. Untuk mewujudkan hal ini maka metode yang diperlukan adalah pengembangan masyarakat (PM). Semua masyarakat memiliki potensi hanya saja bila ada masyarakat yang masih tertinggal itu karena potensi tersebut belum diketemukan atau belum dimanfaatkan [6].

Dalam memahami konsepsi tentang Pengembangan Masyarakat, ada 3 model menurut [7] antara lain :

- (1) Pengembangan masyarakat lokal (locality development);
- (2) Perencanaan sosial (social planning); dan
- (3) Aksi sosial (social action)

Pengembangan masyarakat lokal

Dengan adanya konsep pengembangan masyarakat melalui program urban farming yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian (struktur) telah berhasil membuat kelompok tani (agent) dari kondisi tidak berdaya menjadi lebih berdaya. Hal ini terbukti dengan dimilikinya produk unggulan dari kelompok tani tersebut yang dapat membantu ekonomi keluarga. Sebagaimana konsep dari [6] bahwa kemampuan individu "senasib" untuk mengorganisir diri dalam suatu kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif di tingkat komunitas (collective self-empowerment). Produk unggulan tersebut antara lain Krupuk Samiler, Ikan panceng (Bakar Bandeng dan Gurami), Bandeng Presto, Bakso Rumput Laut, Sirup, Roti, Mie dari Bahan Bogem (buah Mangrove) dan Sabun dan sampo dari bahan Bogem.

Perencanaan Sosial

Kegiatan perencanaan sosial penting dilaksanakan khususnya dalam memecahkan masalah sosial seperti kemiskinan dan pengangguran. Melalui kegiatan ini akan ditentukan kebutuhan masyarakat penerima program sehingga bantuan yang akan diberikan benar-benar sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat miskin.

Partisipasi dalam Proses Perencanaan

Keberhasilan program Urban Farming juga tidak terlepas dari partisipasi masyarakat sasaran program baik partisipasi langsung maupun tidak Partisipasi dalam langsung. pengembangan komunitas harus menciptakan peran serta yang maksimal dengan tujuan agar semua orang dalam masyarakat tersebut dapat dilibatkan secara aktif pada proses dan kegiatan masyarakat [8]. Oleh karena itu pendekatan pengembangan komunitas selalu mengoptimalkan partisipasi, dengan tujuan semua warga ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan dalam proses implementasi serta evaluasi.

Di Indonesia umumnya menggunakan mekanisme perencanaan tahunan melalui forum musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan). Musrenbang ini diawali dari tingkatan lembaga pemerintahan terendah yakni musrenbang kelurahan, kemudian berlanjut ke tingkat kecamatan, kota, provinsi dan terakhir musrenbang nasional.

Meskipun sudah ada forum dalam perencanaan pembangunan, peluncuran Program Urban Farming ini masih bisa dikatakan top down karena saat itu dengan adanya dampak dari krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 membuat perekonomian masyarakat miskin semakin jatuh miskin sehingga ada kebijakan dari Walikota melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinaan Daerah pada tahun 1999 untuk membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan makanan yang bergizi dan mengurangi pengeluaran rumah tangga melalui program urban farming.

Oleh karena program ini bersifat top down sehingga Dinas Pertanian sebagai pemberi bantuan (bagian dari struktur) tidak mendapat informasi mengenai situasi dan kondisi penerima bantuan (agent) dalam hal ini wilayah Kelompok Tani Kelurahan Keputih.

Partisipasi dalam Pelaksanaan Program Urban Farming

Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan yang telah digagas kelanjutan dalam rencana sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi. Partisipasi Kelompok Tani dalam pelaksanaan program urban farming sangat mendukung dan antusias dalam melaksanakan program ini. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh latar belakang mereka yang dulunya waktu di desa sebelum pindah

ke kota bermata pencaharian sebagai petani sehingga menjadikan program ini mudah diterima.

Penerimaan kelompok tani sebagai kelompok sasaran program dalam melaksanakan program *urban farming* ini juga disampaikan oleh petugas PPL bahwa agent (kelompok tani) telah melaksanakan tugasnya dengan baik, mengikuti anjuran dari PPL (struktur) sehingga jika dilihat dari segi partisipasi kelompok tani dalam pelaksanaan program sudah bisa dikatakan berhasil.

Partisipasi dalam Monitoring/Pengawasan Program Urban Farming

Dalam pelaksanaannya program *urban* farming selain dipantau langsung oleh PPL yang merupakan wakil dari Dinas Pertanian, program ini juga di pantau langsung oleh kelurahan dalam hal ini Kasie Kesra Kelurahan.

Petugas PPL melakukan monitoring ke kelompok tani seminggu sekali. Disamping monitoring yang dilakukan oleh PPL, Dinas pertanian juga melakukan monitoring berupa pertemuan fasilitator-fasilitator se Kota Surabaya yang diadakan secara berkala 3 bulan sekali. Fasilitator-fasilitator ini biasanya merangkap sebagai Ketua Kelompok Tani.

Kelompok tani sendiri juga terlibat dalam kegiatan pemantauan yakni berupa pengawasan langsung tanaman bantuan *urban farming* dan pelaporan hasil kegiatan yang format laporannya telah disediakan oleh Dinperta, karena setiap bulan kelompok tani mempunyai kewajiban harus membuat laporan kegiatan untuk dilaporkan ke Dinas Pertanian.

Namun dalam pelaksanaannya agent (kelompok tani) kadang masih belum melaksanakan anjuran dari PPL (struktur) yaitu terkait struktur legitimasi, terutama dalam hal administrasi kegiatan. Sementara itu PPL mempunyai tanggung jawab kepada Dinas Petanian, agar kelompok binaannya mengerjakan laporan yang didalamnya termasuk catatan-catatan perkembangan penanaman tanaman pangan dan holtikultura.

Partisipasi Kelompok Tani dalam Proses Evaluasi Program Urban Farming

Kegiatan evaluasi pelaksanaan program di kelompok tani dilakukan secara rutin baik semesteran maupun tahunan. Akan tetapi jika dirasa perlu, Dinas Pertanian juga melakukan evaluasi yang sifatnya mendadak.

Dari hasil observasi dan wawancara di lapangan didapatkan bahwa evaluasi program urban farming ini hanya dilakukan pada kelompok sasaran saja sedangkan Dinas Pertanian sendiri (struktur) selaku pemilik program hanya melakukan sekali saja selama program ini dijalankan yaitu pada tahun 2010. Seharusnya Dinas Pertanian

meningkatkan target output maupun outcome program urban farming sehingga output dari program ini yang semula hanya mencukupi konsumsi gizi keluarga dan pengurangan pengeluaran rumah tangga bisa ditingkatkan menjadi sumber penghasilan rumah tangga yang handal sehingga program ini berdampak nyata terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Kelompok Tani Tegal Makmur Kelurahan Keputih.

Aksi Sosial

Konsep Pengembangan masyarakat yang ketiga menurut [7] yaitu aksi sosial dimana aksi sosial ini bertujuan agar terjadi perubahan-perubahan fundmental dalam kelembagaan dan struktur masyarakat [6].

Dengan adanya program urban farming, terbentuklah struktur baru di wilayah Keputih Tegal yang di dalamnya mengandung struktur kekuasaan dimana anggota kelompok tani akan bertindak sesuai petunjuk Ketua Kelompok Tani dan arahan PPL. Struktur signifikansi atau wacana seperti misalnya adanya ketua kelompok tani, sekretaris, bendahara dan anggota, adanya praktik budidaya penananam tanaman pangan dan holtikulltura di lahan komunal dan adanya penyebutan kader lingkungan.

Ketua kelompok tani mempunyai peran paling penting pada kelompok tani, dimana anggota akan bertindak sesuai arahan dari ketua kelompok tani (struktur dominasi), ketua kelompok tani juga menghubungkan dari PPL kepada anggota kelompok tani. Semua anggota kelompok tani sangat antusias dalam menjalankan program ini karena mereka sudah memiliki kesadaran praktis dimana mereka sudah mengetahui manfaat dari kegiatan *urban farming* tersebut.

Rekonstruksi Model Urban Farmina

Dalam implementasinya di lapangan Program *Urban farming* di Kelompok Tani Tegal Makmur, terdapat kendala yaitu pada musim kemarau persediaan air sangat minim. Sementara kegatan budidaya tanaman holtikultura di lahan komunal sangat tergantung pada tersedianya air untuk penyiraman tanaman. Pada musim kemarau kelompok tani tidak dapat menanam di lahan komunal sehingga kegiatan *urban farming* sebatas pada pekarangan rumah masing-masing anggota dan pembibitan di kebun pembibitan.

Untuk itu struktur perlu merubah teknik pertanian dari sistem konvensional menjadi sistem yang membutuhkan sedikit air. Hidroponik adalah salah satu teknik pertanian yang membutuhkan sedikit air. Dimana kebutuhan air untuk tanaman hanya yang terserap akar dan penguapan saja.

Produsen sayuran pertanian hidroponik ini di Kota Surabaya sudah ada antara lain Kebun Sayur, Belajar Bareng Hidroponik (BBH), The Real Hidroponik dan Komunitas Hidroponik Surabaya (KHS). Namun menurut penuturan Bapak Venta Agustri salah satu pemilik Kebun Sayur di Surabaya bahwa permintaan sayuran hidroponik di Kota Surabaya sangat tinggi sehingga belum mencukupi untuk mensuplay pasar-pasar modern dan hotelhotel yang ada di Kota Surabaya ini.

Untuk itu Kebun Sayur Surabaya membuka peluang bagi masyarakat Surabaya yang ingin usaha di kebun sayur seperti ini, maka pihak kebun sayur bersedia memberikan bimbingan teknis cara menanam tanaman hidroponik sesuai standart kebun sayur dan bersedia membantu memasarkan.

Melihat peluang seperti ini seharusnya bisa dimanfaatkan oleh Dinas Pertanian dalam mengembangkan program *urban farming* bagi masyarakat miskin agar bisa keluar dari garis kemiskinan. Memang teknik pertanian ini pada awalnya membutuhkan biaya yang agak mahal dibanding cara konvensional, namun untuk selanjutnya biaya operasional untuk produksi sayuran hidroponik jauh lebih murah dibanding menanam cara konvensional. Harga jualnya pun jauh lebih mahal dan lebih sehat dibanding sayuran cara konvensional, karena sayuran hidroponik bebas dari pestisida.

Dinas Pertanian sebagai bagian dari struktur bisa membantu kelompok tani (agent) dalam hal peyediaan konstruksi kebun hidroponik dan pemberian bantuan benih bisa divariasi dengan benih tanaman import agar memenuhi permintaan hotel dan pasar modern. Adapun rekonstruksi model yang kami tawarkan adalah sebagai berikut:



Gambar 01: Rekonstruksi model program urban farming

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa upaya untuk membantu masyarakat miskin yang

tergabung dalam Kelompok Tani Tegal Makmur agar keluar dari kemiskinan adalah meliputi penggantian sistem pertanian dari konvensional menjadi teknik hidroponik dan mengganti jenis komoditas tanaman sayuran menjadi komoditas tanaman eksport sehingga berdaya jual tinggi.

Dengan demikian hasil penjualan yang tinggi disamping gizi keluarga terpenuhi juga dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga lainnya sehingga secara berangsur-angsur kelompok tani Tegal Makmur dapat keluar dari kemiskinan.

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan

Dari hasil penelitian di lapangan mengenai Program Urban Farming ini bila ditinjau dari Teori Strukturasi Anthony Giddens menunjukkan bahwa dalam implementasinya Dinas Pertanian yang merupakan bagian dari struktur masih belum melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan, seperti tidak melibatkan agen (Kelompok Tani Tegal Makmur) dalam proses perencanaan atau bersifat Top Down sehingga struktur tidak mendapatkan informasi mengenai karakteristik wilayan RW VIII Kelurahan Keputih. Seandainya sejak awal penyusunan program melibatkan kelompok tani tentu kendala minimnya air pada saat musim kemarau bisa disiasati dengan perubahan teknik pertanian yang membutuhkan sedikit mempunyai daya jual tinggi dan kualitas sayuran yang lebih baik.

Saran

Diharapkan struktur melakukan apa yang seharusnya dilakukan sehingga pada saat pelaksanaan program tidak lagi terdapat kendala di lapangan. Dengan teknik pertanian yang tepat dan pemasaran yang terkoordinir dengan baik serta pemilihan komoditas yang tepat dapat memberikan hasil yang nyata terhadap peningkatan pendapatan kelompok tani sehingga kelompok tani yang semula dari keluarga miskin dapat keluar dari garis kemiskinan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan oleh peneliti kepada institusi Universitas Brawijaya yang telah memberikan dukungan kepada peneliti sehingga kegiatan penelitian ini bisa terealisasi. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada masyarakat Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya terutama Kelompok Tani Tegal Makmur Kelurahan Keputih, PPL Dinas Pertanian, Kepala Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Kasi Kesra Kelurahan Keputih karena

penelitian ini tidak akan berhasil tanpa keterlibatan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Kesra, B. (2003). Rencana Induk Program Pengendalian Urbanisasi dan Penanganan PMKS di Provinsi Jawa Timur. Surabaya, Jawa Timur
- [2]. Siregar, S. (2010). *Statistika Deskriptif untuk Penelitian*, Jakarta: Rajawali PERS
- [3]. Milles, M., Huberman, A., & Saldhana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis :A Methods Saoucebook Third Edition*. United Kingdom: Sage Publications Inc.
- [4]. Priyono, H. (2002). *Anthony Giddens Sebuah Pengantar*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- [5]. Giddens, A. (2010). *Teori Strukturasi.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [6]. Suharto, E.2010. Analisis Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta.
- [7]. Rothman, J & John, T. (1987). Models of community organization and Macro Perspectives; Their mixing and Phasing dalam Cox, et.al (eds) Strategis of Community Organization. Illinois; F.E Peacock Publishers.
- [8]. Nasdian, F.2014. *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.